

Ikhtisar Webinar Nasional
**Menuju 25 Tahun Agenda
Reformasi Antikorupsi:
Koridor Pemberantasan
Korupsi**



Menuju 25 Tahun Agenda Reformasi Antikorupsi: Koridor Pemberantasan Korupsi

9 Desember 2024 | 09:00-12:00

Sesi dari Webinar Nasional dibuka dengan Keynote Speech yang disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45). *Webinar* ini menghadirkan empat narasumber, yaitu (1) Niken Ariati, Koordinator Harian Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi; (2) Meuthia Ganie-Rochman, Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI; (3) Yusuf Hakim Gumilang, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden; dan (4) Reyhan Noor, Koordinator Analisis LAB 45; serta dimoderatori oleh Jessica Arreta, Analisis Kebijakan Ekonomi Politik LAB 45.

Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB 45, dalam mengungkapkan keprihatinannya terhadap upaya pemberantasan korupsi yang masih belum efektif. Ia mempertanyakan apakah selama ini hanya memotong ranting tanpa mengatasi akar masalah, sehingga korupsi tetap tumbuh subur. Menurutnya, struktur kekuasaan yang sentralistik dan birokrasi yang kaku justru menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Meskipun telah dicoba berbagai macam formula dalam 25 tahun terakhir, tidak ada satu pun yang berhasil memberantas korupsi. Penekanan juga diberikan terhadap komitmen Presiden Prabowo yang sudah sering disuarakan dalam berbagai forum untuk memerangi korupsi, serta peran penting media dalam mengungkap dan melawan praktik tersebut. Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara saat ini, tetapi juga merampas masa depan generasi yang lebih baik. Untuk itu, Jaleswari mengajak semua pihak untuk terus melakukan reformasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merayakan seperempat abadnya dalam tiga tahun ke depan dan mendapatkan tantangan korupsi yang semakin kompleks, terlebih lagi dengan perkembangan digital yang semakin pesat seperti saat ini. Dalam merayakan Hari Antikorupsi, ia mengingatkan bahwa perjuangan untuk memberantas korupsi adalah tugas bersama sebagai rakyat Indonesia. Seperti filosofi Sisyphus, Jaleswari mengungkapkan pelajaran tentang makna perjuangan yang tak kenal lelah. Meskipun tugas kita berat dan tampak tak berujung, kita harus terus berupaya mendorong batu besar korupsi itu ke atas. Setiap upaya yang dilakukan, sekecil apapun, akan membawa kita lebih dekat ke tujuan akhir kita.

Pendekatan Institusional dalam Korupsi

Korupsi institusional berjalannya merupakan istilah yang digunakan oleh Meuthia Ganie-Rochman untuk menggambarkan bagaimana korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga terhubung dalam jaringan antarorganisasi. Pendekatan ini menggunakan perspektif institusional karena seluruh proses pemberantasan korupsi menjadi bagian dari organisasi besar yang saling berinteraksi. KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan, sebagai contoh, berada dalam arena yang sama, bekerja secara terkoordinasi untuk memberantas korupsi. Namun, hubungan antarlembaga ini tidak hanya formal; organisasi-organisasi di luar pemerintahan, seperti

lembaga swadaya masyarakat (LSM), juga dapat berinteraksi dengan ‘arena utama’ sehingga berdampak pada penguatan atau justru dalam pelemahan organisasi.

Besarnya sumber daya yang dimiliki negara dapat menjadi *cashcow* alias sapi perah yang dapat dimanfaatkan para pelaku korupsi demi mengejar keuntungan semata. Kondisi ini diperparah dengan buruknya tata kelola yang makin melanggengkan potensi *cashcow* tersebut. Oleh karena itu, satu regulasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah korupsi karena aktor-aktor yang terlibat saling terhubung dalam jaringan dan mencari celah untuk mengeksploitasi kelemahan sistem yang ada. Solusinya adalah dengan menerapkan aturan yang lebih integratif, serta dapat memperkuat sistem secara keseluruhan. Penanggulangan korupsi harus melibatkan lebih dari sekadar penindakan terhadap individu, karena tanpa pengembangan kasus secara menyeluruh, akar masalahnya tidak bisa dipahami dan ditangani.

Dalam menghadapi korupsi, peran KPK sangat krusial. KPK dibangun untuk menjadi *primus inter pares*—lembaga yang utama di antara lembaga-lembaga sejenis. Jika KPK tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin sistem ini, maka perbaikan terhadap sistem secara keseluruhan akan sangat sulit tercapai. KPK perlu memanfaatkan sumber daya manusia, termasuk pakar di sektor lain dan mahasiswa yang studi di luar negeri, untuk diajak bekerja sama.

Poin-poin penting dalam pengelolaan korupsi di Indonesia antara lain mencakup kebijakan politik yang menghasilkan penurunan signifikan dalam pemenuhan alasan keberadaan KPK, stagnasi dalam proses politik, dan kurangnya instrumen reformasi kelembagaan selama lima tahun terakhir. Selain itu, terdapat sumber *cashcow* yang sangat besar meski dengan tata kelola yang buruk, hilangnya kepemimpinan dalam organisasi ‘arena utama’, serta tekanan yang makin tinggi terhadap organisasi masyarakat yang melakukan kontrol dan memberikan masukan, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknologi baru, seperti *cryptocurrency* dan *dark web*, juga mempengaruhi cara-cara pencucian uang yang lebih canggih.

Dalam menangani korupsi berjalun, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah mengontrol wadah politik seperti akuntabilitas partai politik, membangun mekanisme dasar untuk mengontrol sumber daya alam, memperbaiki koordinasi dalam penegakan hukum, memanfaatkan data dasar, dan mereformasi birokrasi. Terakhir, peningkatan partisipasi publik sangat penting sebagai kekuatan dalam penanganan masalah ini.

Dalam menjawab pertanyaan moderator mengenai peran kalangan kelas menengah ke atas dalam melindungi kelas bawah dalam menyuarakan korupsi, sosialisasi yang efektif harus dilakukan. Akademisi butuh diberikan ruang dan aktor-aktor yang berupaya melakukan hal tersebut perlu diberikan penghargaan. Tindak lanjut terhadap upaya kriminalisasi orang-orang yang berani menyuarakan masalah korupsi juga perlu diperhatikan.

Komitmen Politik Presiden Prabowo terhadap Korupsi

Butir ketujuh dalam dokumen Asta Cita Presiden Prabowo menekankan komitmen politik pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas. Untuk itu, perlu adanya kerja sama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Yusuf Hakim Gumilang, membahas kinerja pemberantasan korupsi oleh pemerintah dan menyebutkan beberapa langkah yang telah diambil pemerintah, seperti pembentukan Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), Kejaksaan Agung, dan KPK. Salah satu strategi pencegahan yang digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) yang membantu memonitor dan mencegah tindak pidana korupsi.

Namun, menurut Yusuf, pemberantasan korupsi menghadapi tantangan besar. Salah satunya terlihat dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang menunjukkan bahwa kondisi korupsi di level makro tidak banyak berubah sejak tahun 2014. Situasi ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih mendalam terhadap masalah korupsi.

Yusuf juga menjelaskan program prioritas presiden yang tertuang dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025-2029, yang berfokus pada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Salah satu fokus utamanya adalah mengatasi korupsi dari hulu, bukan hanya hilir. Hal ini sejalan dengan pandangan Meuthia. Untuk itu, diperlukan implementasi sistem integritas di partai politik, yang akan menjadi bagian dari reformasi institusi partai politik. Modernisasi partai politik dan penguatan digitalisasi juga menjadi langkah penting dalam mengurangi korupsi di Indonesia.

Dampak Konkret Korupsi Tidak Hanya ke Negara, tetapi memiliki Beban Sosial ke Masyarakat

Menurut Niken Ariati, dampak korupsi tidak hanya dirasakan oleh keluarga pelaku yang ditangkap, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara luas. Ada tiga dampak besar dari korupsi yang perlu diperhatikan: kemiskinan, kerusakan alam dan tingginya biaya ekonomi. Ketika korupsi terjadi, kerugiannya jauh lebih besar daripada nilai korupsi itu sendiri karena terdapat biaya sosial yang harus dibayar. Sebagai contoh, jika kerugian akibat korupsi mencapai Rp6 miliar, biaya sosial akibat proses pemeriksaan bisa mencapai Rp2 miliar atau bahkan lebih.

Niken juga menyarankan agar tidak hanya melihat kerugian negara dalam konteks korupsi, tetapi dalam konteks suap-menyuap yang melibatkan individu, terutama yang memiliki jabatan. Strategi pencegahan korupsi dari lembaganya merupakan bagian dari reformasi. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melakukan pencegahan, bukan pemberantasan, karena pencegahan lebih efektif daripada penanganan kasus yang sudah masuk ranah hukum (*yustisia*). Untuk itu, dibutuhkan sistem yang dapat

mendukung pemberantasan korupsi, menjaga agar orang yang baik tetap berada di jalur yang benar, dan menyulitkan orang yang berniat jahat.

Masyarakat cenderung melaporkan satu kasus ke berbagai lembaga sehingga terdapat kebingungan antar lembaga dan cenderung tidak akan memproses hal tersebut. Pemerintah terkadang tidak bergerak jika tidak ada tekanan dari masyarakat seperti diviralkan di media sosial karena cenderung bertindak "asal Bapak senang." Oleh karena itu, kunci utama dalam pencegahan korupsi ada dua, antara lain, jangan menjadi korban dari sistem yang korup dan jangan menjadi pelaku korupsi.

Implikasi Korupsi terhadap Investasi dalam Sudut Pandang Ekonomi

Reyhan Noor memaparkan kondisi ekonomi di dunia menjadi semakin tidak pasti yang terlihat dari tren investasi global yang terus merosot, terutama di negara berkembang. Akibatnya, negara maju kini lebih selektif dalam melakukan investasi. Sementara Indonesia, berada di peringkat ketiga dari bawah di antara anggota BRICS, hanya lebih baik dari Afrika Selatan dan Rusia. Walaupun jumlah investasi yang masuk ke Indonesia berada di peringkat kedua di kawasan ASEAN, tren dalam dua tahun terakhir menunjukkan penurunan, berbeda dari Vietnam dan Singapura yang mengalami peningkatan. Namun, peluang investasi Indonesia masih cukup baik dengan risiko rendah sehingga masih menarik bagi investor dari Tiongkok.

Salah satu tantangan utama Indonesia dalam mendatangkan investasi adalah efisiensi yang rendah. Dalam sepuluh tahun terakhir, tren Indeks Penggunaan Modal Terhadap Output (Incremental Capital Output Ratio, ICOR) Indonesia sangat tinggi, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, bahkan lebih buruk. Indonesia membutuhkan enam kali lipat investasi untuk mencapai satu poin pertumbuhan ekonomi, yang dianggap oleh para ekonom sebagai indikasi kondisi yang tidak efisien. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur dalam periode tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja logistik di Indonesia. Nilai Logistics Performance Indeks (LPI) cenderung stagnan selama sepuluh tahun terakhir, meskipun anggaran konektivitas terus meningkat. Faktor nonteknis di luar studi ekonomi kemungkinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inefisiensi ekonomi. Salah satunya adalah efisiensi birokrasi yang terhambat akibat korupsi yang semakin luas.

Penurunan peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi kini berada di peringkat 135 di dunia akibat pelemahan KPK. Reformasi antikorupsi yang lebih mendalam diperlukan karena korupsi menimbulkan ketimpangan dan semakin sulit untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Upaya untuk membangun masyarakat yang lebih antikoruptif juga masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Masyarakat menjadi semakin permisif terhadap korupsi. Tantangan ini makin berat karena Indonesia mulai dari titik minus, bukan titik nol, dan penurunan ini makin terlihat dalam dua tahun terakhir.

Ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia pun makin memburuk dibandingkan kondisi dua ratus tahun yang lalu, seiring dengan ekonomi rente makin meningkat. Korupsi kini mengancam demokrasi karena mereka yang melakukan tindakan koruptif sering kali merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri. Fenomena ini membuat masyarakat makin permisif terhadap segala bentuk korupsi, seperti politik uang dan suap dalam mengakses layanan publik yang makin dianggap wajar. Potensi konflik kepentingan pun makin besar, mengingat pembuat kebijakan juga terlibat dalam tindakan korupsi.

Sebagai respons, LAB 45 mengusulkan koridor kebijakan reformasi antikorupsi yang lebih efektif. Pertama, perlu adanya regulasi yang lebih kuat, seperti Undang-Undang Perampasan Aset, yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Kedua, transparansi dalam semua aspek pemerintahan dan bisnis harus diperkuat, termasuk membuat peraturan terkait *beneficiaries ownership*. Ketiga, pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana dan kebijakan. Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus seharusnya dapat berfungsi tidak hanya sebagai pengendali output melainkan memastikan pembangunan tepat sasaran tanpa diorupsi. Keempat, pemberdayaan perempuan juga menjadi faktor penting untuk mendobrak kelompok-kelompok yang koruptif dan biasanya didominasi oleh laki-laki. Data menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen dan penurunan praktik korupsi. Perempuan cenderung lebih segan untuk diajak terlibat dalam tindakan koruptif karena faktor stigma karakteristik dari perbedaan gender dan akan lebih memperjuangkan isu-isu yang dekat dan penting di masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

Sesi Tanya-Jawab

Pertanyaan: Apakah desentralisasi dan otonomi daerah menjadi faktor yang menyebabkan korupsi mengakar di Indonesia?

Yusuf berpendapat bahwa desentralisasi memang berfungsi sebagai alat, tetapi akar permasalahannya terletak pada anggaran dan sistem yang diterapkan. Jika sistemnya diperbaiki, desentralisasi tetap berjalan bila korupsi dapat dikendalikan. Perbaikan perlu dilakukan pada institusi pengawasan serta sistem politik, karena keduanya merupakan inti dari masalah korupsi. Selain itu, negara harus lebih berperan dalam mendanai partai politik agar proses politik menjadi lebih transparan.

Pertanyaan: Apakah mungkin untuk mengurangi ketergantungan pada pimpinan dalam upaya pemberantasan korupsi, misalnya melalui penegak hukum atau sistem politik?

Jawaban: Niken percaya dan tetap optimis, karena sejak bergabung dengan KPK pada tahun 2005 sudah melihat banyak perubahan, terutama dengan makin banyaknya generasi muda yang mulai peduli. Perubahan ini tentunya tidak mudah, karena sistem politik masih menghambat akses langsung kepada pemilihan pucuk pimpinan. Namun, diperlukan untuk mulai memperbaiki sistem dari hulu, khususnya di level partai politik. Selain itu, masyarakat perlu lebih kritis terhadap praktik politik uang. Begitu pula dengan ASN. Meski kini makin jarang terlibat kasus korupsi, masih ada beberapa pejabat yang tertangkap—biasanya mereka yang berada di posisi lebih tinggi.

Pertanyaan: Apakah masih ada harapan untuk reformasi korupsi di Indonesia, mengingat banyak anak muda yang masih kurang peduli dan abai?

Jawaban: Meuthia merasa bahwa tidak semua anak muda menyadari pentingnya moralitas dan banyak juga yang kurang konsisten dalam pendiriannya. Para pemikir reformis, terutama di universitas, seharusnya dapat membuat semacam laboratorium untuk merancang sistem pemberantasan korupsi dan berinteraksi langsung dengan anak muda. Perlu untuk mengubah *framework* untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Moralitas harus diajarkan kepada anak muda, bukan hanya di ruang kuliah, tetapi juga melalui pergaulan dan lingkungan mereka dalam pengalaman berorganisasi.

Pertanyaan: Bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi rente dan permasalahan ekonomi di Indonesia?

Jawaban: Reyhan berpendapat bahwa masalah rente harus ditangani oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, bukan ASN. Sistem yang ada harus diubah agar tidak menciptakan rente baru, karena rente biasanya terbentuk dari atas ke bawah, bukan sebaliknya.

Pertanyaan: Apakah benar-benar ada laporan anonim terhadap aparat yang nyata? Bagaimana dengan transparansi terhadap pejabat?

Jawaban: Niken menjelaskan bagaimana kanal pengaduan sebenarnya sudah tersedia, tetapi masalahnya bukan hanya pada ada atau tidaknya kanal, tetapi juga bagaimana pengaduan tersebut ditindaklanjuti. Banyak kanal yang ada, tetapi jika ada banyak aduan masuk, malah jadi rumit untuk ditindaklanjuti, karena pengaduan yang tersebar ke banyak lembaga bisa menjadi tumpang tindih dan tidak efisien. Oleh karena itu, lebih baik jika pengaduan difokuskan dan diviralkan agar lebih mudah ditindaklanjuti.

Meuthia menambahkan bahwa memang ada masalah di dalam sistem dan situasi politik internal, termasuk di KPK. Pemanfaatannya masih kurang efektif meskipun sistem pengaduan sudah ada. Pemerintah perlu memikirkan sistem yang lebih baik, tetapi akan sia-sia tanpa komitmen dari orang-orang yang bertugas untuk mengisinya. Sistem *whistleblower* masih sangat lemah dan perlu dorongan agar lebih banyak orang berani melapor.

Pertanyaan: Apakah masyarakat yang permisif terhadap korupsi disebabkan oleh kondisi ekonomi-sosial, atau lebih karena budaya-kebiasaan? Bagaimana cara meminimalkan atau bahkan menghapus sifat permisif tersebut?

Jawaban: Meuthia menganggap masalahnya terletak pada bagaimana mengelola sumber daya dan kompleksitas kebijakan. Masyarakat sering kali lebih memprioritaskan pandangan mereka terhadap pemimpin yang mereka pilih, baik itu suka atau tidak suka. Jika ingin memperkuat diri, maka harus mampu menarik logika masyarakat. Sayangnya, organisasi yang ada masih sangat lambat dalam berinovasi dan belum ada budaya belajar berorganisasi yang baik. Masyarakat menjadi pragmatis dan individualis, serta sulit melihat hubungan antara perubahan struktural dan dampak jangka panjang.

Pertanyaan: Bagaimana sebaiknya membatasi rente yang sering terjadi karena campur tangan negara?

Jawaban: Reyhan meyakini bahwa peran pemerintah harus lebih maksimal. Kesejahteraan tidak dapat berjalan dengan baik jika sistem rente terus berlangsung. Sebagai analogi dari Niken, masalah rente perlu dibersihkan dengan air bersih, bukan dengan air kotor. Selain itu, peran perempuan yang lebih berdaya perlu lebih diperhatikan dalam pengambilan keputusan di tingkat kebijakan, untuk membantu memerangi korupsi, khususnya di parlemen.



Jalan Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, 13890



Senin, 09 Desember
2024

→ +62811452045

→ lab45@lab45.id

→ www.lab45.id